

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2004
TENTANG
DANA ALOKASI UMUM
DAERAH PROVINSI, DAERAH KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diunah dengan Peraturan pemerintah Nomor 84 Tahun 2001, Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah telah melakukan penghitungan Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Daerah kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2005;
- b. bahwa penghitungan Dana Alokasi Umum sebagaimana tersebut pada huruf a dilakukan dengan memperhatikan hasil Rapat Kerja Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2005 pada tanggal 22 September 2004;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a dan huruf b, Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2005, perlu ditetapkan dengan Peraturan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 9. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 151 Tahun 2000;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI, DAERAH KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2005.**

BAB I PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM

Pasal 1

- (1) Dana Alokasi Umum terdiri dari:
 - a. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi;
 - b. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Besarnya Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2005 ditetapkan 25,5% (dua puluh lima koma lima persen) dari Penerimaan Dalam Negeri Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 setelah dikurangi dengan Penerimaan Negara yang dibagikan kepada Daerah dan Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi.
- (3) Besarnya Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk Daerah Provinsi sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dana Alokasi Umum sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (2);
 - b. Untuk Daerah Kabupaten/Kota sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Dana Alokasi Umum sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (2).

BAB II PERHITUNGAN DANA ALOKASI UMUM

Pasal 2

- (1) Penghitungan Dana Alokasi Umum untuk masing-masing Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan dengan menggunakan rumus sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001.
- (2) Perhitungan Dana Alokasi Umum suatu Daerah juga mempertimbangkan Faktor Penyeimbang dengan tujuan untuk menghindari kemungkinan penurunan kemampuan Daerah dalam pembiayaan beban pengeluaran yang menjadi tanggung jawab Daerah.
- (3) Faktor penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Alokasi Dasar kepada Daerah yang dihitung berdasarkan lumpsum dan berdasarkan proporsi beban belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2004.

Pasal 3

Perhitungan Dana Alokasi Umum untuk 64 (enam puluh empat) Daerah otonom baru yang merupakan hasil pemekaran Tahun 2002 dan Tahun 2003, dilakukan dengan membagi

secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan beban kebutuhan belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Dana Alokasi Umum daerah induknya.

Pasal 4

- (1) Hasil perhitungan Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3, ditetapkan berdasarkan usulan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
- (2) Rincian Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2005 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada masing-masing Daerah diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6

- (1) Gubernur melaporkan penggunaan Dana Alokasi setiap triwulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (2) Bupati/Walikota melaporkan penggunaan Dana Alokasi setiap triwulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2005.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 3 TAHUN 2004
TANGGAL : 9 Desember 2004

RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
DAERAH PROVINSI, DAERAH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2005

dalam jutaan rupiah

NO.	DAERAH	JUMLAH
I	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	271.147
1	Kab. Aceh Barat	139.496
2	Kab. Aceh Besar	192.200
3	Kab. Aceh Selatan	145.661
4	Kab. Aceh Singkil	117.849
5	Kab. Aceh Tengah	120.251
6	Kab. Aceh Tenggara	149.207
7	Kab. Aceh Timur	159.002
8	Kab. Aceh Utara	199.896
9	Kab. Bireuen	183.713
10	Kab. Aceh Pidie	242.139
11	Kab. Simeuleu	105.355
12	Kota Banda Aceh	160.363
13	Kota Sabang	92.661
14	Kota Langsa	104.780
15	Kota Lhokseumawe	108.124
16	Kab. Nagan Raya	116.281
17	Kab. Aceh Jaya	100.016
18	Kab. Aceh Barat Daya	103.201
19	Kab. Gayo Lues	112.152
20	Kab. Aceh Tamiang	120.685
21	Kab. Bener Meriah	57.692
II	Provinsi Sumatera Utara	313.745
1	Kab. Asahan	292.231
2	Kab. Dairi	138.511

NO.	DAERAH	JUMLAH
3	Kab. Deli Serdang	330.429
4	Kab. Tanah Karo	194.397
5	Kab. Labuhan Batu	286.548
6	Kab. Langkat	293.755
7	Kab. Mandailing Natal	183.019
8	Kab. Nias	172.962
9	Kab. Simalungun	313.639
10	Kab. Tapanuli Selatan	265.560
11	Kab. Tapanuli Tengah	153.475
12	Kab. Tapanuli Utara	149.607
13	Kab. Toba Samosir	108.378
14	Kota Binjai	140.594
15	Kota Medan	426.572
16	Kota Pematang Siantar	149.682
17	Kota Sibolga	101.569
18	Kota Tanjung Balai	106.177
19	Kota Tebing Tinggi	114.202
20	Kota Padang Sidempuan	128.044
21	Kab. Pakpak Bharat	43.399
22	Kab. Nias Selatan	82.051
23	Kab. Humbang Hasundutan	83.584
24	Kab. Serdang Bedagai	188.714
25	Kab. Samosir	62.082
III	Provinsi Sumatera Barat	247.487
1	Kab. Limapuluh Kota	179.246
2	Kab. Agam	204.252
3	Kab. Kepulauan Mentawai	110.806
4	Kab. Padang Pariaman	197.236
5	Kab. Pasaman	115.592
6	Kab. Pesisir Selatan	206.774
7	Kab. Sawahlunto Sijunjung	107.707

NO.	DAERAH	JUMLAH
8	Kab. Solok	151.940
9	Kab. Tanah Datar	182.326
10	Kota Bukit Tinggi	110.632
11	Kota Padang Panjang	93.129
12	Kota Padang	287.033
13	Kota Payakumbuh	119.970
14	Kota Sawahlunto	89.637
15	Kota Solok	94.643
16	Kota Pariaman	95.973
17	Kab. Pasaman Barat	109.228
18	Kab. Dharmasraya	71.212
19	Kab. Solok Selatan	62.813
IV	Provinsi Riau	92.157
1	Kab. Bengkalis	206.723
2	Kab. Indragiri Hilir	203.823
3	Kab. Indragiri Hulu	162.264
4	Kab. Kampar	185.109
5	Kab. Kuantan Sengingi	118.228
6	Kab. Pelalawan	109.947
7	Kab. Rokan Hilir	91.848
8	Kab. Rokan Hulu	104.146
9	Kab. Siak	95.609
10	Kota Dumai	93.479
11	Kota Pekanbaru	171.345
V	Provinsi Kepulauan Riau	25.963
1	Kab. Kepulauan Riau	85.225
2	Kab. Natuna	147.584
3	Kab. Karimun	122.891
4	Kota Batam	125.831
5	Kota Tanjung Pinang	100.315

NO.	DAERAH	JUMLAH
6	Kab. Lingga	46.333
VI	Provinsi Jambi	243.618
1	Kab. Batanghari	145.487
2	Kab. Bungo	164.193
3	Kab. Kerinci	193.116
4	Kab. Merangin	169.898
5	Kab. Muaro Jambi	143.794
6	Kab. Sarolangun	139.535
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	133.439
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	130.807
9	Kab. Tebo	142.287
10	Kota Jambi	198.220
VII	Provinsi Sumatera Selatan	242.707
1	Kab. Lahat	206.384
2	Kab. Musi Banyuasin	145.336
3	Kab. Musi Rawas	201.781
4	Kab. Muara Enim	187.293
5	Kab. Ogan Komering Ilir	244.152
6	Kab. Ogan Komering Ulu	134.240
7	Kota Palembang	351.714
8	Kota Pagar Alam	92.469
9	Kota Lubuk Linggau	104.057
10	Kota Prabumulih	87.906
11	Kab. Banyuasin	210.948
12	Kab. Ogan Ilir	93.165
13	Kab. OKU Timur	128.782
14	Kab. OKU Selatan	83.203
VIII	Provinsi Bangka Belitung	187.358
1	Kab. Bangka	95.112

NO.	DAERAH	JUMLAH
2	Kab. Belitung	88.920
3	Kota Pangkal Pinang	108.718
4	Kab. Bangka Selatan	56.695
5	Kab. Bangka Tengah	49.070
6	Kab. Bangka Barat	55.370
7	Kab. Belitung Timur	63.902
IX	Provinsi Bengkulu	230.653
1	Kab. Bengkulu Selatan	92.904
2	Kab. Bengkulu Utara	166.265
3	Kab. Rejang Lebong	118.964
4	Kota Bengkulu	167.655
5	Kab. Kaur	65.711
6	Kab. Seluma	88.328
7	Kab. Mukomuko	84.811
8	Kab. Lebong	52.396
9	Kab. Kepahiang	42.642
X	Provinsi Lampung	300.878
1	Kab. Lampung Barat	165.705
2	Kab. Lampung Selatan	337.196
3	Kab. Lampung Tengah	331.429
4	Kab. Lampung Utara	225.963
5	Kab. Lampung Timur	282.847
6	Kab. Tanggamus	285.091
7	Kab. Tulang Bawang	224.124
8	Kab. Way Kanan	154.732
9	Kota Bandar Lampung	264.151
10	Kota Metro	121.947
XI	Provinsi DKI Jakarta	768.080
XII	Provinsi Jawa Barat	495.604

NO.	DAERAH	JUMLAH
1	Kab. Bandung	802.830
2	Kab. Bekasi	284.954
3	Kab. Bogor	603.964
4	Kab. Ciamis	432.352
5	Kab. Cianjur	443.536
6	Kab. Cirebon	434.850
7	Kab. Garut	520.631
8	Kab. Indramayu	350.810
9	Kab. Karawang	344.920
10	Kab. Kuningan	308.582
11	Kab. Majalengka	328.468
12	Kab. Purwakarta	209.379
13	Kab. Subang	313.196
14	Kab. Sukabumi	446.400
15	Kab. Sumedang	316.698
16	Kab. Tasikmalaya	411.220
17	Kota Bandung	458.072
18	Kota Bekasi	313.589
19	Kota Bogor	214.806
20	Kota Cirebon	143.039
21	Kota Depok	239.099
22	Kota Sukabumi	134.188
23	Kota Cimahi	161.663
24	Kota Tasikmalaya	205.408
25	Kota Banjar	52.871
XIII	Provinsi Banten	198.018
1	Kab. Lebak	288.401
2	Kab. Pandeglang	300.727
3	Kab. Serang	372.524
4	Kab. Tangerang	448.770
5	Kota Cilegon	105.298

NO.	DAERAH	JUMLAH
6	Kota Tangerang	214.108
XIV	Provinsi Jawa Tengah	549.956
1	Kab. Banjarnegara	276.999
2	Kab. Banyumas	404.114
3	Kab. Batang	222.826
4	Kab. Blora	285.250
5	Kab. Boyolali	313.078
6	Kab. Brebes	402.905
7	Kab. Cilacap	392.866
8	Kab. Demak	280.831
9	Kab. Grobogan	344.330
10	Kab. Jepara	276.946
11	Kab. Karanganyar	284.448
12	Kab. Kebumen	362.789
13	Kab. Kendal	286.808
14	Kab. Klaten	404.869
15	Kab. Kudus	227.890
16	Kab. Magelang	329.065
17	Kab. Pati	337.244
18	Kab. Pekalongan	253.342
19	Kab. Pemasang	330.900
20	Kab. Purbalingga	263.393
21	Kab. Purworejo	281.270
22	Kab. Rembang	215.234
23	Kab. Semarang	279.060
24	Kab. Sragen	306.460
25	Kab. Sukoharjo	272.531
26	Kab. Tegal	344.869
27	Kab. Temanggung	233.303
28	Kab. Wonogiri	336.549
29	Kab. Wonosobo	243.974

NO.	DAERAH	JUMLAH
30	Kota Magelang	125.606
31	Kota Pekalongan	132.335
32	Kota Salatiga	124.117
33	Kota Semarang	332.098
34	Kota Surakarta	218.082
35	Kota Tegal	178.273
XV	Provinsi DI Yogyakarta	238.692
1	Kab. Bantul	
2	Kab. Gunung Kidul	268.325
3	Kab. Kulon Progo	231.438
4	Kab. Sleman	318.139
5	Kota Yogyakarta	201.231
XVI	Provinsi Jawa Timur	454.635
1	Kab. Bangkalan	258.229
2	Kab. Banyuwangi	398.823
3	Kab. Blitar	335.944
4	Kab. Bojonegoro	321.111
5	Kab. Bondowoso	251.718
6	Kab. Gresik	261.283
7	Kab. Jember	500.843
8	Kab. Jombang	313.443
9	Kab. Kediri	380.907
10	Kab. Lamongan	324.917
11	Kab. Lumajang	283.848
12	Kab. Madiun	246.292
13	Kab. Magetan	261.901
14	Kab. Malang	513.563
15	Kab. Mojokerto	270.558
16	Kab. Nganjuk	318.323
17	Kab. Ngawi	284.397

NO.	DAERAH	JUMLAH
18	Kab. Pacitan	222.922
19	Kab. Pamekasan	244.186
20	Kab. Pasuruan	378.252
21	Kab. Ponorogo	288.950
22	Kab. Probolinggo	279.153
23	Kab. Sampang	231.753
24	Kab. Sidoarjo	365.661
25	Kab. Situbondo	221.834
26	Kab. Sumenep	363.407
27	Kab. Trenggalek	256.498
28	Kab. Tuban	295.978
29	Kab. Tulungagung	320.158
30	Kota Blitar	121.252
31	Kota Kediri	131.453
32	Kota Madiun	207.320
33	Kota Malang	221.130
34	Kota Mojokerto	111.550
35	Kota Pasuruan	125.070
36	Kota Probolinggo	117.368
37	Kota Surabaya	359.520
38	Kota Batu	104.489
XVII	Provinsi Kalimantan Barat	312.572
1	Kab. Bengkayang	139.435
2	Kab. Landak	175.116
3	Kab. Kapuas Hulu	228.587
4	Kab. Ketapang	280.615
5	Kab. Pontianak	262.388
6	Kab. Sambas	213.446
7	Kab. Sanggau	187.427
8	Kab. Sintang	193.26
9	Kota Pontianak	185.162

NO.	DAERAH	JUMLAH
10	Kota Singkawang	131.200
11	Kab. Sekadau	67.308
12	Kab. Melawi	84.082
XVIII	Provinsi Kalimantan Tengah	287.641
1	Kab. Barito Selatan	141.639
2	Kab. Barito Utara	138.902
3	Kab. Kapuas	223.483
4	Kab. Kotawaringin Barat	161.422
5	Kab. Kotawaringin Timur	208.462
6	Kota Palangkaraya	158.298
7	Kab. Barito Timur	113.134
8	Kab. Murung Raya	149.861
9	Kab. Pulang Pisau	132.211
10	Kab. Gunung Mas	131.156
11	Kab. Lamandau	108.574
12	Kab. Sukamara	95.933
13	Kab. Katingan	166.028
14	Kab. Seruyan	143.291
XIX	Provinsi Kalimantan Selatan	230.647
1	Kab. Banjar	191.629
2	Kab. Barito Kuala	146.618
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	153.812
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	154.454
5	Kab. Hulu Sungai Utara	99.073
6	Kab. Kota Baru	122.129
7	Kab. Tabalong	131.960
8	Kab. Tanah Laut	134.568
9	Kab. Tapin	127.693
10	Kota Banjar Baru	118.503
11	Kota Banjarmasin	205.512

NO.	DAERAH	JUMLAH
12	Kab. Balangan	71.533
13	Kab. Tanah Bumbu	83.574
XX	Provinsi Kalimantan Timur	72.547
1	Kab. Berau	123.949
2	Kab. Bulungan	170.177
3	Kab. Kutai Kartanegara	297.814
4	Kab. Kutai Barat	116.624
5	Kab. Kutai Timur	103.060
6	Kab. Malinau	104.034
7	Kab. Nunukan	81.629
8	Kab. Pasir	116.584
9	Kota Balikpapan	135.092
10	Kota Bontang	75.718
11	Kota Samarinda	194.482
12	Kota Tarakan	72.991
13	Kab. Penajam Paser Utara	31.970
XXI	Provinsi Sulawesi Utara	247.873
1	Kab. Bolaang Mongondow	239.965
2	Kab. Minahasa	141.308
3	Kab. Sangihe	182.538
4	Kota Bitung	131.493
5	Kota Manado	201.530
6	Kab. Kepulauan Talaud	126.523
7	Kab. Minahasa Selatan	137.597
8	Kota Tomohon	44.775
9	Kab. Minahasa Utara	84.082
XXII	Provinsi Gorontalo	209.429
1	Kab. Boalemo	73.286
2	Kab. Gorontalo	181.354

NO.	DAERAH	JUMLAH
3	Kota Gorontalo	138.105
4	Kab. Pohuwato	84.277
5	Kab. Bone Bolango	79.746
XXIII	Provinsi Sulawesi Tengah	271.756
1	Kab. Banggai	197.394
2	Kab. Banggai Kepulauan	131.080
3	Kab. Buol	124.527
4	Kab. Toli-Toli	145.171
5	Kab. Donggala	238.354
6	Kab. Morowali	166.950
7	Kab. Poso	156.061
8	Kota Palu	171.947
9	Kab. Parigi Moutong	166.132
10	Kab. Tojo Una Una	70.141
XXIV	Provinsi Sulawesi Selatan	332.725
1	Kab. Bantaeng	122.487
2	Kab. Barru	137.899
3	Kab. Bone	276.736
4	Kab. Bulukumba	191.275
5	Kab. Enrekang	140.058
6	Kab. G o w a	225.163
7	Kab. Jeneponto	162.925
8	Kab. Luwu	168.609
9	Kab. Luwu Utara	123.785
10	Kab. Majene	124.600
11	Kab. Mamuju	150.289
12	Kab. M a r o s	165.016
13	Kab. Pangkajene Kepulauan	164.764
14	Kab. Pinrang	170.627
15	Kab. Polewali Mamasa	181.737

NO.	DAERAH	JUMLAH
16	Kab. Selayar	119.057
17	Kab. Sidenreng Rappang	156.382
18	Kab. Sinjai	145.522
19	Kab. Soppeng	164.543
20	Kota Takalar	149.184
21	Kota Tana Toraja	212.603
22	Kota Wajo	173.212
23	Kab. Pare-pare	124.411
24.	Kota Makassar	323.075
25	Kota Palopo	116.342
26	Kab. Mamasa	112.804
27	Kab. Luwu Timur	93.146
28	Kab. Mamuju Utara	47.476
XXV	Provinsi Sulawesi Tenggara	254.152
1	Kab. Buton	134.207
2	Kab. Kendari	185.291
3	Kab. Kolaka	154.950
4	Kab. Muna	205.014
5	Kota Kendari	185.291
6	Kota Bau-bau	125.237
7	Kab. Konawe Selatan	113.545
8	Kab. Bombana	59.070
9	Kab. Wakatobi	37.679
10	Kab. Kolaka Utara	48.228
XXVI	Provinsi Bali	199.924
1	Kab. Badung	165.685
2	Kab. Bangli	130.689
3	Kab. Buleleng	258.283
4	Kab. Gianyar	198.172
5	Kab. Jembrana	156.827

NO.	DAERAH	JUMLAH
6	Kab. Karangasem	180.482
7	Kab. Klungkung	134.371
8	Kab. Tabanan	212.991
9	Kota Denpasar	187.085
XXVII	Provinsi Nusa Tenggara Barat	249.887
1	Kab. Bima	203.508
2	Kab. Dompu	139.447
3	Kab. Lombok Barat	243.894
4	Kab. Lombok Tengah	260.804
5	Kab. Lombok Timur	308.859
6	Kab. Sumbawa	179.554
7	Kota Mataram	167.660
8	Kota Bima	118.169
9	Kab. Sumbawa Barat	40.269
XXVIII	Provinsi Nusa Tenggara Timur	299.984
1	Kab. Alor	153.700
2	Kab. Belu	194.596
3	Kab. Ende	166.722
4	Kab. Flores Timur	154.291
5	Kab. Kupang	213.553
6	Kab. Lembata	128.017
7	Kab. Manggarai	206.161
8	Kab. Ngada	161.677
9	Kab. Sikka	161.536
10	Kab. Sumba Barat	186.467
11	Kab. Sumba Timur	164.704
12	Kab. Timor Tengah Selatan	211.747
13	Kab. Timor Tengah Utara	158.095
14	Kota Kupang	159.274
15	Kab. Rote Ndao	109.644

NO.	DAERAH	JUMLAH
16	Kab. Manggarai Barat	75.462
XXIX	Provinsi Maluku	272.775
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	187.310
2	Kab. Maluku Tengah	209.122
3	Kab. Maluku Tenggara	127.534
4	Kab. Buru	153.547
5	Kota Ambon	179.681
6	Kab. Seram Bagian Barat	67.664
7	Kab. Seram Bagian Timur	41.896
8	Kab. Kepulauan Aru	61.623
XXX	Provinsi Maluku Utara	226.815
1	Kab. Halmahera Tengah	54.286
2	Kab. Halmahera Barat	85.614
3	Kota Ternate	137.417
4	Kab. Halmahera Timur	61.610
5	Kota Tidore Kepulauan	86.296
6	Kab. Kepulauan Sula	63.109
7	Kab. Halmahera Selatan	91.146
8	Kab. Halmahera Utara	85.220
XXXI	Provinsi Papua	418.864
1	Kab. Biak Numfor	175.602
2	Kab. Jayapura	187.688
3	Kab. Jayawijaya	154.898
4	Kab. Merauke	277.379
5	Kab. Mimika	199.499
6	Kab. Nabire	225.313
7	Kab. Paniai	231.597
8	Kab. Puncak Jaya	214.662
9	Kab. Yapen Waropen	121.693

NO.	DAERAH	JUMLAH
10	Kota Jayapura	186.593
11	Kab. Sarmi	122.833
12	Kab. Keerom	77.933
13	Kab. Yahukimo	109.740
14	Kab. Pegunungan Bintang	91.615
15	Kab. Tolikara	75.296
16	Kab. Boven Digoel	92.232
17	Kab. Mappi	103.372
18	Kab. Asmat	114.480
19	Kab. Waropen	109.012
20	Kab. Supiori	23.203
XXXII	Provinsi Irian Jaya Barat	128.243
1	Kab. Sorong	138.238
2	Kab. Manokwari	188.665
3	Kab. Fak Fak	149.497
4	Kota Sorong	152.401
5	Kab. Sorong Selatan	130.125
6	Kab. Raja Ampat	68.571
7	Kab. Teluk Bintuni	108.341
8	Kab. Teluk Wondama	41.738
9	Kab. Kaimana	115.859
	Total Provinsi	8.876.559
	Total Kabupaten/Kota	79.889.041
	Total Nasional	88.765.600

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO